

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AUSTRALIA DI LAUT CINA SELATAN

Bab kedua hadir untuk memaparkan perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai *non-claimant state* di Laut Cina Selatan. Australia berkomitmen untuk menjaga eksistensinya di kawasan Indo-Pasifik, utamanya di Laut Cina Selatan sesuai norma yang berlaku. Kebijakan luar negeri Australia tersebut didasari oleh posisi strategis Laut Cina Selatan yang memberikan banyak manfaat bagi Australia. Akan tetapi, mulai tahun 2018 kebijakan luar negeri Australia cenderung mengalami perubahan. Australia secara perlahan menunjukkan keterlibatannya dalam permasalahan sengketa di Laut Cina Selatan.

Bab ini akan menguraikan informasi mengenai strategi dan kebijakan luar negeri Australia. Bab ini akan menunjukkan perubahan kebijakan luar negeri Australia di Laut Cina Selatan. Bagian pertama bab ini merupakan penjelasan kebijakan luar negeri Australia terkait keamanan. Bagian kedua bab ini yaitu *grand strategy* Australia di kawasan Indo-Pasifik. Bagian ketiga bab ini akan memaparkan terkait kebijakan luar negeri atau sikap Australia di Laut Cina Selatan sebelum tahun 2018. Bagian keempat bab ini akan menunjukkan perubahan sikap Australia di Laut Cina Selatan mulai tahun 2018-2022.

2.1 Kebijakan Luar Negeri Australia terkait Keamanan

Keamanan merupakan aspek mendasar dari kebijakan luar negeri Australia. Australia memiliki prioritas keamanan, utamanya terkait *Pacific*

Islands, dimana Australia secara sadar mengetahui bahwa keamanan dan stabilitas sangat penting bagi kepentingan strategisnya (Australian Government, n.d.). Selain itu, dalam kebijakan luar negeri Australia turut mempertimbangkan isu keamanan nasional, dimana isu keamanan nasional dan kebijakan luar negeri ini menjadi prioritas utama dalam kampanye federal. Pemerintah mempunyai tujuan untuk memastikan kesejahteraan warga Australia dengan menjaga keamanan negaranya (CSIS, 2022).

Prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam kebijakan luar negeri Australia yaitu kepatuhan terhadap hukum internasional, penghormatan terhadap kedaulatan nasional, tidak menggunakan unsur pemaksaan, dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Prinsip-prinsip yang dimiliki Australia tersebut telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan Australia di lingkup internasional. Transformasi dari kebijakan luar negeri Australia telah mencerminkan kebutuhan untuk dapat menyesuaikan dengan tantangan baru, termasuk memperbarui *Foreign Policy White Paper* dan mengonsep ulang tugas-tugas kebijakan luar negeri prioritas tertinggi Australia (Maude, 2021). Aliansi keamanan Australia turut mempunyai peran yang penting dalam pendekatan kebijakan luar negerinya terhadap keamanan, seperti ANZUS dan AUKUS. Aliansi-aliansi tersebut telah membantu Australia untuk memperoleh kerja sama pertahanan, kemitraan strategis, dan akses terhadap kemampuan militer tingkat lanjut. Sehingga, dapat membantu meningkatkan keamanan Australia dan berkontribusi dalam stabilitas regional (Agius, 2021).

Pendekatan pertahanan Australia dapat dipahami dengan menggunakan dua konsep utama, yaitu *forward defence* dan *continental defence*. Konsep tersebut mengacu pada pendekatan-pendekatan Australia yang berbeda terhadap keamanan dan pertahanan yang telah diadopsi selama ini. *Forward defence* diadopsi oleh Australia mulai tahun 1950-1960an. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk melawan ancaman yang dirasakan terhadap keamanan Australia yang asalnya sejauh mungkin dari wilayah Australia (Brangwin et al., 2015). Harapannya agar Australia dapat melakukan perlawanan terhadap musuh sebelum mereka dapat mencapai wilayah Australia. Pendekatan ini turut melibatkan pemeliharaan militer yang kuat di kawasan dan pembangunan aliansi dengan negara-negara lain (Chen, 2023).

Continental defence diadopsi mulai tahun 1970-1980an oleh Australia. Kebijakan ini memiliki fokus pada pertahanan benua Australia terhadap serangan dari luar. Australia membentuk angkatan pertahanan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuannya dalam operasi di luar kawasan Australia, tetapi lebih fokus membela Australia. Fokus Australia dalam perencanaan pertahanan yaitu melindungi perairan utara Australia, baik dari sisi udara maupun laut dari serangan musuh. Pendekatan pertahanan Australia melibatkan keseimbangan antara *forward defence* dan *continental defence*. Keduanya dibutuhkan oleh Australia untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari kemampuan pertahanan yang dimiliki oleh Australia (Kuper, 2019).

Kebijakan luar negeri Australia terkait keamanan telah dilakukan dengan multilateralisme dan regionalisme, membangun hubungan keamanan yang kuat

dengan sekutu, dan memprioritaskan keamanan nasional dalam kampanye federal. Kebijakan luar negeri Australia dipandu oleh multilateralisme dan regionalisme, termasuk dalam membangun hubungan bilateral yang baik dengan sekutu Australia. Membangun hubungan keamanan yang kuat telah dilakukan oleh Australia seperti yang dilakukan dengan Jepang, dimana kemudian Jepang menjadi mitra strategis khusus Australia pada tahun 2014 (Bisley, 2014). Dalam kampanye federal, masalah keamanan nasional dalam kebijakan luar negeri menjadi suatu prioritas. Para pemilih ingin mengetahui pihak mana yang nantinya akan menjaga keamanan Australia (Michael, 2022). Selain itu, masyarakat Australia memiliki pandangan yang beragam terkait mitra keamanan Australia. 43% masyarakat memprioritaskan fokus keamanan pada kawasan Australia, termasuk Asia dan Pasifik; 33% memprioritaskan pendekatan globalis; dan 20% memprioritaskan kerja sama dengan mitra tradisional dan negara-negara barat, tak terkecuali Amerika Serikat (Schaus, 2023). Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Australia lebih menginginkan kebijakan luar negeri Australia memiliki fokus keamanan pada kawasan Australia, termasuk Asia dan Pasifik.

Arah perubahan pada kebijakan luar negeri Australia mengalami perubahan untuk mempertimbangkan keberadaan Asia pada tahun 2012, dapat terlihat dari diterbitkannya *Australia in the Asian Century White Paper*. *White Paper* ini memuat langkah pendekatan Australia dalam menjalin hubungan dengan Asia di abad ke-21, dengan mempertimbangkan peluang ekonomi, kebangkitan Asia, kerja sama regional, dan dinamika yang berkembang di

kawasan tersebut. Asia dinilai dapat menghadirkan peluang ekonomi yang sangat besar bagi Australia apabila dapat terhubung dengan pasar Asia. Australia menyadari pentingnya keberadaan Asia dalam membentuk lanskap global menyesuaikan dinamika yang terus berubah, dimana Asia mengalami kebangkitan yang luar biasa dalam hal pertumbuhan ekonomi, signifikansi budaya, dan pengaruh politik. Australia telah lama menekankan kerja sama regional dalam kebijakan luar negerinya. Oleh karenanya, hal tersebut turut mendorong Australia untuk memperkuat hubungan regional dan melakukan kolaborasi lebih besar dengan negara-negara di Asia (Australian Government, 2012).

2.2 Grand Strategy Australia di Indo-Pasifik

Pandangan Australia terkait kawasan di Indo-Pasifik tertuang dalam Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia, salah satunya yang diterbitkan tahun 2016 oleh *Australian Government Department of Defence*. Dalam Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia tahun 2016, Australia akan meningkatkan keterlibatannya dalam hal keamanan dengan negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Australia akan meningkatkan pelatihan dan pembangunan kapasitas. Australia juga akan mengusahakan pengaturan perdagangan dan investasi regional, serta membantu untuk meredakan persaingan strategis di kawasan tersebut. Stabilitas Australia di kawasan Indo-Pasifik sangat bergantung pada dua mitra terpenting Australia, yaitu Amerika Serikat dan Cina. Australia akan mendorong Amerika Serikat dan Cina untuk memastikan ketegangan ekonomi di antara mereka tidak memberikan pengaruh pada persaingan strategis ataupun merusak sistem perdagangan multilateral. Seiring

berjalannya waktu, mempersatukan Amerika Serikat dan Cina dalam suatu perjanjian perdagangan bebas di seluruh kawasan akan mengurangi ketegangan ekonomi dan membantu memaksimalkan prospek pertumbuhan ekonomi kawasan (Australian Government Department of Defence, 2016).

Pandangan lain Australia dalam melihat kawasan Indo-Pasifik juga tertuang dalam Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia tahun 2013. Dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy White Paper*) Australia tahun 2013 ini, Australia semakin memperjelas kepentingan jangka panjangnya dalam stabilitas kawasan yang disebut Asia-Pasifik. Indo-Pasifik merupakan perpanjangan yang logis dari Asia-Pasifik, dimana sesuai dengan fokus strategis prioritas Australia yang membentang dari India ke Asia Tenggara hingga Asia Timur Laut yang merupakan jalur komunikasi laut dari kawasan ini. Seiring berjalannya waktu, lingkungan keamanan Australia akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kawasan Indo-Pasifik dan pembangunan di dalamnya mengalami perubahan. Adanya perselisihan historis maritim atau teritorial seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur maupun peningkatan kapasitas militer di banyak negara, meningkatkan risiko mendestabilisasi persaingan strategis (Australian Government Department of Defence, 2013).

Rory Medcalf dalam tulisannya yang berjudul “*Rules, Balance, and Lifelines: An Australian Perspective on the South China Sea*” menyebutkan bahwa Australia memiliki kepentingan yang sangat banyak di kawasan Indo-Pasifik. Manfaat besar akan diperoleh Australia jika tetap menjaga eksistensinya di kawasan Indo-Pasifik, termasuk pandangan dunia dari sisi perdagangan dan

kekuatan. Jalur kehidupan maritim yang kuat salah satunya berada di perairan Asia Tenggara, dimana sekitar 54% dari keseluruhan jalur perdagangan internasional Australia harus melewati Laut Cina Selatan. Pemerintah Australia mengakui bahwasannya inti dari Indo-Pasifik adalah jalur maritim yang melalui perairan Asia tenggara, termasuk Laut Cina Selatan. Oleh karenanya, muncul kekhawatiran oleh Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik yang dinyatakan sebagai pusat gravitasi ekonomi global. Australia khawatir apabila dikemudian hari kebebasan dalam menggunakan jalur perairan internasional tersebut harus dibatasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terlebih, maraknya isu dari negara-negara di sekitar perairan Laut Cina Selatan yang menyatakan klaimnya atas wilayah tersebut. Kekhawatiran Australia tersebut tidak hanya disebabkan oleh ketergantungan perdagangannya yang melalui perairan Laut Cina Selatan, tetapi juga disebabkan oleh banyaknya mitra perdagangan dan keamanan Australia yang bergantung pada jalur tersebut, sehingga besar kemungkinan untuk memberikan pengaruh pada Australia (Medcalf, 2016).

Meningkatnya kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik didorong oleh stabilitas dari kawasan. Sekarang ini, Indo-Pasifik sedang melakukan proses transisi strategis yang dapat dikatakan sama besar dengan transformasi ekonomi yang sudah ada sebelumnya. Oleh karenanya, kawasan Indo-Pasifik memiliki keterkaitan kuat dengan tujuan kebijakan luar negeri jangka panjang Australia, dimana Australia ingin memastikan kawasannya dapat berkembang dengan damai tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam hubungan kerja sama dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai langkah

dalam mendukung stabilitas Australia di kawasan Indo-Pasifik, Australia turut bergabung dengan AUKUS dan QUAD untuk menjaga keseimbangan militer regional (Grossman, 2023).

Sengketa perbatasan baik laut maupun darat merupakan sumber utama ketidakstabilan potensial yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik. Sengketa ini terdiri dari tiga kekuatan besar Asia yaitu Cina, Jepang dan India, serta negara-negara Asia Tenggara dan Pakistan. Tidak hanya itu, negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia juga turut terlibat dalam upaya membangun kawasan sengketa tersebut agar damai sesuai hukum internasional. Laut Cina Selatan merupakan garis patahan utama dalam tatanan regional. Australia bukan sebagai *claimant state*, namun memiliki kepentingan besar dalam stabilitas jalur perairan internasional yang penting sesuai norma hukum yang mengaturnya. Australia mendesak para *claimant state* Laut Cina Selatan untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan dan menyerukan penghentian kegiatan reklamasi dan konstruksi wilayah. Australia sangat prihatin dengan skala aktivitas Cina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Australia menentang penggunaan struktur buatan di Laut Cina Selatan untuk tujuan militer. Oleh karenanya, Australia mendukung penyelesaian perbedaan *claimant state* Laut Cina Selatan melalui negosiasi berdasarkan pada hukum internasional yang berlaku (Australian Government Department of Defence, 2016).

Grand strategy Australia di Indo-Pasifik secara garis besar yaitu Australia akan meningkatkan keterlibatannya dalam hal keamanan dengan negara-negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Australia akan memperkuat

perlindungan perbatasan, hukum dan keadilan, serta kemampuan intelejen. Hal yang mendasari *grand strategy* Australia yang sedemikian rupa yaitu Australia memiliki kepentingan yang sangat banyak di kawasan Indo-Pasifik, baik kestabilan perekonomian maupun pandangan dunia dari sisi perdagangan dan kekuatan. Di sisi lain, sengketa perbatasan di Laut Cina Selatan menjadi sumber utama ketidakstabilan potensial di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun bukan sebagai *claimant state* Laut Cina Selatan, Australia turut terlibat dalam upaya membangun kawasan sengketa tersebut agar damai sesuai hukum internasional dikarenakan memiliki kepentingan besar dalam stabilitas jalur perairan internasional tersebut.

2.3 Sikap Australia di Laut Cina Selatan Sebelum Tahun 2018

Australia sebelumnya belum menaruh perhatian yang serius dalam konflik di Laut Cina Selatan. Sikap Australia ini dapat terlihat dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan Australia yang tertuang dalam Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia terhadap Laut Cina Selatan, baik dilihat dari cara pandang Australia dalam kawasan tersebut maupun negara-negara yang berkaitan dengan konflik (*claimant state*). Terdapat tujuh Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Australia, khususnya Departemen Pertahanan Australia. Tujuh Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia tersebut dikeluarkan pada tahun 1976, 1987, 1994, 2000, 2009, 2013, dan 2016.

Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia tahun 1976 menyebutkan bahwa Australia menyambut baik kesempatan untuk mengembangkan hubungan baik dengan Cina dan menyadari bahwa mereka

memiliki perbedaan sikap politik. Australia melihat kekuatan utama di Indo-Pasifik adalah Cina, India dan Jepang. Oleh karena itu, Australia ingin mempunyai hubungan persahabatan dengan ketiga negara tersebut (Australian Government Department of Defence, 1976).

Pemerintah Australia pada periode 1977-1986 tidak menerbitkan Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*), sehingga kebijakan luar negeri Australia masih berpedoman pada Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) tahun 1976. Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia tahun 1987 menyebutkan bahwa Australia mengoperasikan pesawat patroli maritim jarak jauh Orion dari Butterworth untuk mempertahankan pengawasan Laut China Selatan. Pengawasan ini dilakukan seiring dengan pengembangan kebijakan dengan mitra Asia Tenggara, dimana Australia percaya bahwa ada celah dalam kerja sama militer regional untuk meningkatkan penekanan dalam pengaturan logistik. Patroli pengawasan yang dilakukan Australia oleh pesawat RAAF di Laut Cina Selatan tetap berlanjut untuk kepentingan strategis. Patroli ini memungkinkan Australia untuk memantau pergerakan angkatan laut Soviet di Teluk Cam Ranh, Vietnam, yang merupakan kawasan kepentingan strategis Australia (Australian Government Department of Defence, 1987).

Pemerintah Australia pada periode 1988-1993 tidak menerbitkan Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*), sehingga kebijakan luar negeri Australia masih berpedoman pada Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) tahun 1987. Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia tahun 1994 menyebutkan bahwa Australia melihat Cina menjadi ekonomi terbesar kedua di

dunia dalam lima belas tahun ke depan dan memungkinkan untuk Cina meningkatkan militernya terutama di maritim. Cina kemungkinan akan terus mengejar tujuan strategisnya dengan diplomatik, ekonomi, dan politik yang dimilikinya, serta didukung kekuatan militernya yang terus meningkat. Kecenderungan strategis Australia di Indo-Pasifik akan menuntut Australia untuk mementingkan kontak pertahanan dengan negara-negara besar Asia, seperti Cina. Australia akan mengembangkan dialog strategis dengan Cina dan mendorong Cina untuk berpartisipasi dalam diskusi keamanan regional dan multilateral lainnya. (Australian Government Department of Defence, 1994).

Pemerintah Australia pada periode 1995-1999 tidak menerbitkan Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*), sehingga kebijakan luar negeri Australia masih berpedoman pada Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) tahun 1987. Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia tahun 2000 menyebutkan bahwa Cina merupakan lawan bicara yang strategis dan penting bagi Australia karena memiliki pengaruh dan peningkatan keamanan tercepat di kawasan. Kerja sama terkait isu-isu strategis dengan Cina menjadi prioritas bagi Pemerintah Australia (Australian Government Department of Defence, 2000).

Pemerintah Australia pada periode 2001-2008 tidak menerbitkan Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*), sehingga kebijakan luar negeri Australia masih berpedoman pada Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) tahun 2000. Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia tahun 2009 menyebutkan bahwa kecepatan dan struktur modernisasi militer Cina memiliki potensi menciptakan kekhawatiran negara sekitarnya jika tidak disertai dengan

penjelasan yang baik terkait rencana militernya. Pemerintah Australia mengakui bahwa Australia harus membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap kebijakan dan sikap keamanan Cina, terlebih terkait interaksinya dengan mitra strategis utama Australia (Amerika Serikat, India, dan Jepang). Pemerintah Australia merasa perlu untuk melibatkan Cina untuk menjadi pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung kepentingan bersama yang stabil dan makmur di kawasan Laut Cina Selatan. Hal ini dikarenakan Cina akan menjadi pusat pengembangan kerja sama keamanan di kawasan Laut Cina Selatan. Pemerintah Australia memiliki prioritas untuk mengembangkan hubungan pertahanan dengan Cina agar dapat mengetahui transparansi tentang kemampuan dan niat militer Cina untuk dapat memahami satu sama lain (Australian Government Department of Defence, 2009).

Pemerintah Australia pada periode 2010-2012 tidak menerbitkan Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*), sehingga kebijakan luar negeri Australia masih berpedoman pada Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) tahun 2009. Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia tahun 2013 menyebutkan bahwa Australia memandang perselisihan teritorial atau historis maritim di Laut Cina Selatan yang merupakan titik nyala regional dan peningkatan kapasitas militer banyak negara dapat meningkatkan risiko destabilisasi persaingan strategis. Australia menginginkan tatanan strategis di kawasan tersebut aman dan damai. Pemerintah Australia tidak yakin bahwa Australia diharuskan memilih antara persekutuannya yang telah berlangsung lama dengan Amerika Serikat atau perluasan hubungan kerja sama dengan Cina,

keduanya juga tidak akan percaya bahwa Australia harus membuat pilihan sedemikian rupa. Pemerintah Australia tidak mendekat kepada Cina karena memandang Cina sebagai musuh, tetapi mendorong kebangkitan Cina dan memastikan bahwa persaingan strategis di Laut Cina Selatan tidak mengarah pada konflik. Australia memiliki kepentingan dalam penyelesaian sengketa teritorial di Laut Cina Selatan secara damai sesuai dengan hukum internasional, keamanan maritim dan kebebasan navigasi di jalur Laut Cina Selatan, dan pencegahan agresi di Asia Tenggara. Pemerintah Australia mendukung komunitas regional untuk mencapai tujuan tersebut dan mengurangi dampak dari risiko strategis kawasan tersebut. (Australian Government Department of Defence, 2013).

Pemerintah Australia pada periode 2014-2015 tidak menerbitkan Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*), sehingga kebijakan luar negeri Australia masih berpedoman pada Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) tahun 2013. Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia tahun 2016 menyebutkan bahwa Australia berusaha untuk memperluas dan memperdalam hubungan pertahanan dengan Cina sembari mengakui perbedaan kepentingan strategis dalam beberapa masalah keamanan global dan regional. Australia tidak memihak *claimant state* Laut Cina Selatan, namun prihatin dengan ketegangan kawasan tersebut dan menentang klaim teritorial dan hak maritim yang tidak sesuai UNCLOS. Australia telah meminta *claimant state* Laut Cina Selatan untuk menghentikan kegiatan klaim wilayah dan meminta mereka menahan diri untuk meredakan ketegangan. *Claimant state* Laut Cina Selatan perlu untuk terbuka terkait tujuan akhir dari kegiatan klaim wilayah, baik ASEAN ataupun Cina

sesegera mungkin untuk menyetujui Kode Etik Laut Cina Selatan. Kepentingan strategis pertahanan Australia yaitu kawasan Indo-Pasifik yang stabil untuk mendukung kepentingan perdagangan Australia (Australian Government Department of Defence, 2016).

Tabel 2.1 Buku Putih Pertahanan (*Defence White Paper*) Australia

No.	Tahun	Prioritas Kebijakan Luar Negeri Australia di Laut Cina Selatan
1	1976	Pemerintah Australia melihat Cina, India, dan Jepang sebagai kekuatan utama di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Australia menyambut baik kesempatan untuk mengembangkan hubungan baik dengan Cina.
2	1987	Pemerintah Australia melakukan patroli pengawasan di Laut China Selatan seiring dengan pengembangan kebijakan dengan mitra Asia Tenggara dan untuk memantau pergerakan angkatan laut Uni Soviet di Teluk Cam Ranh, Vietnam, yang merupakan kawasan kepentingan strategis Australia.
3	1994	Pemerintah Australia akan mengembangkan dialog strategis dengan Cina dan mendorong Cina untuk turut berpartisipasi penuh dalam diskusi multilateral dan keamanan regional lainnya. Pemerintah Australia melihat bahwa Cina menjadi fokus utama pertumbuhan ekonomi Asia dan telah meningkatkan kemampuan militernya. Hal ini akan memberikan pengaruh pada kerangka strategis Indo-Pasifik.

4	2000	Pemerintah Australia memiliki prioritas tinggi pada kerja sama dengan Cina dalam pengembangan isu-isu strategis di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Australia melihat bahwa Cina memiliki peningkatan paling cepat dalam memberikan pengaruh keamanan di kawasan tersebut.
5	2009	Pemerintah Australia merasa perlu melibatkan Cina sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam mendukung kepentingan bersama di kawasan Laut Cina Selatan. Pemerintah Australia memiliki prioritas dalam mengembangkan hubungan pertahanan dengan Cina untuk mengetahui transparansi rencana militer Cina. Pemerintah Australia membangun pemahaman lebih mendalam terhadap kebijakan dan sikap keamanan Cina.
6	2013	Pemerintah Australia menginginkan tatanan strategis di kawasan Laut Cina Selatan aman dan damai sesuai dengan hukum internasional, keamanan maritim dan kebebasan navigasi di jalur Laut Cina Selatan, dan pencegahan agresi di Asia Tenggara. Pemerintah Australia mendukung komunitas regional untuk mencapai tujuan tersebut dan mengurangi dampak dari risiko strategis kawasan tersebut. Pemerintah Australia mendorong kebangkitan Cina dan memastikan bahwa persaingan strategis di Laut Cina Selatan tidak mengarah pada konflik.
7	2016	Pemerintah Australia akan berusaha memperluas dan

	<p>memperdalam hubungan pertahanan dengan Cina sembari mengakui perbedaan kepentingan strategis. Pemerintah Australia tidak memihak <i>claimant state</i> Laut Cina Selatan, tetapi turut prihatin dengan ketegangan di kawasan tersebut. Pemerintah Australia telah meminta <i>claimant state</i> Laut Cina Selatan untuk menghentikan kegiatan klaim wilayah untuk meredakan ketegangan. Pemerintah Australia memiliki kepentingan pertahanan strategis di kawasan Indo-Pasifik yang stabil sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk mendukung perdagangan Australia.</p>
--	---

Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber (2023)

Sikap Australia sebelum 2018 di kawasan Laut Cina Selatan juga turut ditunjukkan dengan bergabungnya Australia dalam QUAD di tahun 2007. Namun, forum ini tidak bertahan lama dan pada akhirnya bubar di tahun 2008. QUAD kembali didirikan pada tahun 2017 dikarenakan keberadaannya dianggap memiliki urgensi. QUAD adalah singkatan dari *Quadilateral Security Dialogue*, dimana merupakan sebuah forum strategis yang sifatnya informal. Forum ini beranggotakan 4 negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, India, dan Jepang. Tujuan dibentuknya QUAD (*Quadilateral Security Dialogue*) yaitu sebagai ajang untuk saling bertukar informasi antar negara anggota, utamanya terkait bantuan ekonomi dan pembangunan regional (Buchan & Rimland, 2020).

2.4 Sikap Australia di Laut Cina Selatan Tahun 2018-2022

Sikap Australia terhadap konflik di kawasan Laut Cina Selatan mengalami perubahan disebabkan oleh memburuknya hubungan Australia dengan Cina. Hubungan Australia dan Cina mulai memburuk pada tahun 2018-2022. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia terhadap Cina yang berdampak pada keterlibatannya dalam menanggapi konflik di Laut Cina Selatan. Australia mengeluarkan kebijakan luar negerinya melalui *official statement* yang disampaikan ke media dalam kurun waktu 2018-2022.

Malcolm Turnbull sebagai Perdana Menteri Australia menekankan bahwa angkatan laut Australia memiliki hak untuk melakukan pelayaran di kawasan Laut Cina Selatan. Hal ini disebabkan adanya laporan bahwa terdapat tiga kapal perang milik Australia yang dicegat oleh kapal angkatan laut milik Cina. Tiga kapal angkatan laut Australia yang dihadang oleh Cina yaitu *Success*, *Anzac*, dan *Toowoomba*. Ketiga kapal angkatan laut Australia tersebut berada di kawasan Asia Tenggara untuk melaksanakan misi dalam kurun waktu tiga bulan. Misi tersebut akan melibatkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara untuk turut serta dalam latihan perang. Kapal angkatan laut Australia *Success* dan *Anzac* berlayar melalui kawasan Laut Cina Selatan dari Filipina, tepatnya di Subic Bay. Sedangkan kapal angkatan laut Australia *Toowoomba*, berlayar melalui kawasan Laut Cina Selatan dari Malaysia ke Vietnam (Yoseph, 2018).

Australia bergabung dalam latihan militer dengan Amerika Serikat. Maka dari itu, Pemerintah Australia melakukan pelacakan terhadap sebuah kapal pengintai Cina yang diperkirakan akan mengawasi latihan militer yang dilakukan

oleh Australia dan Amerika Serikat dengan berada di luar perairan teritorialnya. Latihan gabungan ini memang khusus dilakukan karena tindakan Cina yang mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan yang merupakan jalur perdagangan strategis dan kaya sumber daya alam senilai 5 triliun dolar AS setiap tahunnya. Latihan militer gabungan antara Australia dan Amerika Serikat akan diikuti oleh 25.000 personel militer. Mereka akan menempati kapal perang yang telah disertai dengan pesawat-pesawat tempur. 25.000 personel tersebut akan melakukan latihan militer gabungan Talisman Sabre yang diselenggarakan setiap dua tahun (BBC, 2019).

Australia mengkritik keras atas klaim Cina di kawasan Laut Cina Selatan dan menuduh Cina tidak memiliki dasar hukum terkait maritim di perairan Laut Cina Selatan dan aneksasi teritorial (Arbar, 2020b). Australia juga melakukan penyelidikan pada laporan yang memuat bahwa Cina telah memberikan instruksi secara lisan kepada para konsumen untuk menghindari pasokan yang berasal dari Australia (Rafie, 2020). Australia dan ketiga negara anggota QUAD (*Quadrilateral Security Dialogue*) akan melakukan latihan angkatan laut pertama kalinya secara besar dan bersama di Samudera Hindia sebagai langkah untuk meningkatkan kekuatan hubungan militer mereka di tengah situasi panas dengan Cina. Latihan tersebut dikenal dengan sebutan Latihan Malabar (CNN, 2020b).

Australia bergabung dalam pakta pertahanan AUKUS merupakan suatu akronim dalam bahasa Inggris dari negara anggotanya yang terdiri atas Australia, *United Kingdom*, dan *United State*. Tujuan dibentuknya AUKUS ini yaitu untuk menangkalkan tindakan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Dalam pakta pertahanan ini

diprioritaskan pembuatan kapal selam, dimana menanggapi ancaman Cina mendirikan pulau-pulau buatan yang dapat menampung beberapa pangkalan militernya di kawasan Laut Cina Selatan (BBC, 2021a).

Australia tetap akan bertekad untuk melakukan pengawasan dari udara terhadap wilayah perairan Laut Cina Selatan, walaupun pada bulan Mei pesawat angkatan udara Australia telah dicegat dan dirusak oleh jet Cina menggunakan serpihan aluminium (VOA, 2022). Australia menggunakan pesawat pengintai P-8A Poseidon untuk mengawasi kapal perang Cina yang sedang melakukan pelayaran di Laut Arafura menuju Pasifik. Namun, kapal perang Cina tersebut menembakkan laser ke pesawat pengintai Australia karena dianggap berbahaya untuk awak kapal (Dama, 2022a).

Pemerintah Australia telah mengumumkan rencana pembangunan pangkalan militer baru di pantai timur Australia, yang digunakan untuk kapal selam nuklir. Hal ini juga telah diupayakan oleh pemerintah Amerika Serikat agar Australia mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir dengan tujuan meningkatkan pertahanan dan keamanannya di kawasan Indo-Pasifik (Deutsche Welle, 2022).

Australia akan segera membeli HIMARS (Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi) dan kebutuhan lainnya senilai 385 juta dolar AS. Ini merupakan bentuk kegigihan Australia untuk memperlihatkan militernya di kawasan Indo-Pasifik, terlebih melihat aktivitas Cina di kawasan itu (Dama, 2022b). Australia melaporkan adanya kapal mata-mata dari Cina di kawasan lepas pantai Australia Barat selama seminggu terakhir. Lokasi kapal tersebut dekat dengan instalasi

intelijen dan militer Australia. Australia melakukan pelacakan terhadap kapal tersebut (CNBC, 2022a).

Australia telah mengumumkan bahwa akan melakukan percepatan pada program pengadaan rudal. Program pengadaan rudal ini akan maju beberapa tahun lebih cepat dari yang semestinya disebabkan oleh adanya ancaman dari Cina yang semakin mendekatkan diri ke Australia (Dama, 2022c). Australia menyampaikan melalui Perdana Menteri Scott Morrison akan melakukan ekspansi militer yang akan menghabiskan dana 38 miliar dolar Australia dengan tujuan untuk menghadapi keadaan konflik di Indo-Pasifik yang semakin memanas dan melengkapi kemampuan pertahanan yang dimiliki Australia agar dapat menjadi “kolega yang bonafide” bagi, Amerika Serikat, NATO, dan Inggris (Deutsche Welle, 2022).

Data-data tersebut telah menunjukkan bahwa Australia telah menaruh perhatian yang serius terhadap permasalahan di Laut Cina Selatan. Bahkan, sikap dari Australia ini dinilai cukup jauh untuk statusnya yang hanya sebagai *non-claimant state*, utamanya ketika terdapat keterlibatan hubungan yang memburuk dengan Cina. Sebagai *non-claimant state*, langkah Australia yang terbilang cukup jauh dalam menaruh perhatian terhadap permasalahan Laut Cina Selatan terbukti dalam tindakannya yang bergabung dalam pakta pertahanan AUKUS, QUAD, pembangunan pangkalan militer baru untuk kapal selam nuklir, percepatan program pengadaan rudal, dan langkah besar selanjutnya yaitu ekspansi militer.